BAB IV

FUNGSI KORPS PMII PUTRI (KOPRI) WILAYAH LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dalam Bab ini penulis akan menganalisa data yang telah diperoleh, yakni dengan melihat ada atau tidaknya teori dengan realita dilapangan. Analisa data ini dilakukan setelah data dari seluruh responden dan informan terkumpul, baik melalui studi kepustakaan, wawancara maupun dokumen-dokumen yang diperoleh yang berkaitan dengan Fungsi Korps PMII Putri (KOPRI) Wilayah Lampung dalam pemberdayaan Perempuan.

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyak nya institusi (LSM, Ormas) yang intens di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang actual dan factual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan. Sebagai contoh adalah kuota perempuan.

Dalam hal ini perempuan harus jeli melihat atau memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam ranah public, bukan hal yang mudah bagi perempuan untuk memiliki kesempatan itu harus dibarangi dengan proses yang

panjang dan tanggung jawab yang besar maka sangat di perlukan adanya pembelajaran-pembelajaran ataupun pelatihan, diskusi, bedah buku, dan diharapkan juga peka terhadap masalah-masalah perempuam pada saat ini.

A. Proses Pemberdayaan Perempuan

1. Latar belakang Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah kekuatan yang dimiliki setiap individu yang apabila diaplikasikan dengan baik maka akan memberi dampak kepada diri sendiri maupun masyarakat sekitar dalam perubahan yang lebih baik. Demikian halnya dengan perempuan adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kesempurnaan, baik dari segi intelektual, potensi hidup, dan segala kelebihannya, sudah menjadi suatu kewajiban bagi perempuan khusunya untuk mengembangkan taraf hidup dengan baik, baik dalam keluarga, sosial, terlebih khusus untuk diri sendiri, Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan adalah untuk dikembangkan untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu orang dapatkan, sehingga kita bisa saling berinteraksi dan bertukar pikiran dalam memajukan kehidupan kita sendiri khususnya, sedangkan kekurang bukan untuk ditutupi akan tetapi dijadikan sebagai suatu yang bemanfaat dan mengharuskan kita selalu berfikir positif bahwa ada manfaat dari kekurangan itu, dan tentunya itu ujian dari Allah SWT apakah hambanya selalu bersyukur atau tidak dalam setiap kondisi apapun.

Apabila pemberdayaan perempuan disatukan secara teoritis akan berdampak positif, karena pemberdayaan adalah alat perubahan dan perempuan sebagai objek yang akan di rubah dan di perbaiki pemikiran dan kehidupannya.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan:

1. sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan
2. sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Adapun pemberdayaan perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain public maupun domestic

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, Negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan, politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.

Perempuan sebagai obejek perubahan dalam pembangunan, diharapkan perempuan harus cerdas dalam melihat segala sesuatu sehingga tercapainya tujuan bersama/organisasi yang diikuti.

KOPRI Wilayah Lampung sebagai organisasi pemberdayaan intelektual dan skil dalam menjalankan aktivitas keorganisasian harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, seperti AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga), peraturan organisasi, GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi), dan produk hukum PMII lainnya. Sebagai objek pemberdayaan perempuan, pengurus KOPRI Wilayah Lampung memiliki kewajiban untuk memahami dan mengimplementasikan dari setiap pedoman yang ada, baik itu dalam menjalankan programnya maupun kebijakan-kebijakan lain yang akan dan sedang dilaksanakan.

Sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART PMII bahwa dari setiap tindakan yang dilakukan oleh kader dan anggota dirumuskan pada saat rapat (musyawarah). Begitu pula pada pengurus KOPRI Wilayah Lampung yang selalu mengumpulkan setiap pengurus KOPRI untuk mengadakan rapat guna pemecahan permasalahan. Dengan kata lain, seorang pengurus tidak bisa menetapkan keputusan maupun kebijakan tanpa rapat pengurus terlebih dahulu. Artinya selalu ada koordinasi anatar pengurus dalam menentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa suasana demokratis dalam tatanan kepengurusan KOPRI Wilayah Lampung menjadi sebuah tipologi bagi kemajuan aktivitas organisasi.

Setiap permusyawarahan atau forum-forum rapat yang dilaksanakan, tidak hanya pengurus yang berhak mengajukan argumentasinya, kader dan anggota lain pun dapat melakukannya, yang nantinya setelah itu kesepakatan forum yang menetukan.

Jadi jelas, didalam KOPRI Wilayah lampung pun mengedepankan keberdayaan perempuan dalam mengajukan pendapat sehingga dapat di ambil keputusan. Artinya tidak semerta-merta perempuan mengikuti organisasi hanya sebagai peramai atau formalitas akan tetapi di jadikan objek sebagai pengambil keputusan dalam organisasi yang di butuhkan. Namun terkadang ini menjadi hambatan tersendiri bagi pengurus, yang biasanya disebabkan oleh ketidakseriusan pengurus maupun anggota pada forum-forum permusyawarahan sehingga pengambilan keputusan memerlukan waktu yang panjang dan organisasi tidak berkembang.

2. Inkonsistensi Pelaksanaan Kegiatan

Bila pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan tersebut akan meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tehap perencanaan dalam suatu pembangunan sangatlah diperlukan, dalam tahap ini, terdapat aktivitas-aktivitas untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Didalam suatu kebijakan, implementasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi merupakan pelaksanaan ekaragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai hasil yang diinginkan harus mendapat dukungan dari setiap orang yang terlibat didalamnya. Satu hal yang tidak kalah penting yakni pelaksanaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama oleh anggota.

Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan perempuan yang ada di KOPRI Wilayah Lampung, ada aturan yang harus dipatuhi yang tertuang dlaam AD/ART yang menjadi pedoman setiap yang ada didalamnya untuk bertindak. Apabila dukungan dari kader dan anggota dalam pelaksanaan seimbang dengan aturan yang telah ditetapkan maka hasil yang diperoleh pasti akan member dampak yang positif.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KOPRI tidaklah mudah, selain karena kendala-kendala seperti sumber daya manusia yang sudah di paparkan diatas, persoalan memasuki dan mencoba merubah cara berfikir orang adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Tetapi KOPRI telah melakukannya dalam waktu yang tidak bisa dikatakan sebentar, meskipun

kemudian juga terjadi pasang surut pemikiran yang mempengaruhi orientasi-orientasi kegiatan KOPRI.

1. Keanggotaan

Kegiatan KOPRI Lampung secara umum memberikan dampak yang positif bagi anggota namun tidak berjalan dengan baik, sebab ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai denga AD/ART. Dalam AD/ART dijelaskan bahwa yang berhak ikut sebagai anggota adalah mahasiswi (perempuan), namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ada seorang perempuan yang telah lulus sebagai anggota didalamnya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang terjadi dalam KOPRI Wilayah Lampung.

Dalam AD/ART juga dijelaskan bahwa setiap anggota harus menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulannya. Namun hal ini sangat jarang dialakukan oleh para anggota karena kesibukan masing-masing untuk megurus kewajiban mereka.

2. Pengunaan Dana

Penggunaan dana sesuai dengan musyawarah yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang yang dipaparkan dalam proposal yang telah diverifikasi oleh Ketua Umum. Namun berdasarkan observasi peneliti kelapangan, ada anggota yang menyalahgunakan dana tersebut, hal ini dikuatkan peranataan informan perempuan yang menyatakan bahwa dengan adanya program, anggota dapat meningkatkan aktivitasnya, namun ada juga yang menyalahgunakan dana

tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal diatas menunjukkan bahwa ada anggota yang tidak dapat merasakan dampak positif dari program tersebut akibat penyalahgunaan yang dilakukan.

3. Partisipasi Perempuan

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu syarat yang mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini, pengabaian terhadap faktor terbuka ini, telah menyebabkan penurunan yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan anggota. Pemilihan dan pemberdayaan anggota dalam keseluruhan rangkaian pelaksanaan pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan sosial ekonomi sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan KOPRI Lampung, memiliki tujuan-tujuan khusus yang diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh anggota tanpa terkecuali dan anggota dapat memberikan kontribusinya sebagai pelaku pembangunan. Dalam pelaksaan kegiatan tersebut diharapkan anggota juga dapat memberikan kontribusinya dalam program ini. Kontribusi tersebut dapat dilperihatkan dari sikap anggota dalam memikul beban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keperempuan. Disini partisipasi anggota

memperlihatkan adanya sikap yang terlihat secara aktif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan KOPRI tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan KOPRI Wilayah Lampung, anggota dalam bidang-bidang tertentu merupakan suatu wadah untuk memberdayakan anggota terutama kaum perempuan. Partisispasi perempuan dalam hal ini tampak dari antusias mereka untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan.

Salah satu tujuan dari KOPRI adalah untuk menghapuskan diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan. Dengan hadirnya KOPRI ini diharapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kemandirian seperti yang diharapkan oleh masyarakat terutama perempuan terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, para anggota KOPRI memilik hak yang sama. Ketika melakukan musyawarah terlihat bahwa setiap masyarakat baik laiki-laki bebas dalam memberikan pendapat dan saran, hal ini didukung oelh pernyataan dari Ketua Umum. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, mereka masih dipengaruhi oeleh pemikiran mereka selama ini yang menganggap bahwa perempuan tidak akan pernah memiliki peran yang sama denga laki-laki.

Disinilah mengapa peneliti melakukan penelitian guna untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan perempuan pada organisasi KOPRI berlangsung, dan apa saja kelebihan dan kelemahan dalam organisasi

KOPRI.dan seberapa besar KOPRI melakukan perubahan terhadap permpuan yang mengikti organisasi tersebut.